

UJI VALIDITAS SKALA PARTISIPASI POLITIK

Gartika Nurani Erawan

Magister Profesi Psikologi Universitas Gadjah Mada

Abstract

This research aims to test construct validity of politic participation, built based on theory which was developed by Dalton (2009). Politic participation consists of five dimensions, voting, campaign activity, communal activity, contacting personal on personal matters, and protest. Data was obtained from 258 subjects. Factor analysis method used in this research was confirmatory factor analysis (CFA) using Lisrer 8.70. Validity testing of politic participation scale was done using second order model. Based on testing using this model, 13 valid items which can be used to measure politic participation was obtained.

Keywords: *Construct validity, Politic participation, CFA*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji validitas konstruk dari skala partisipasi politik yang disusun berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Dalton (2009). Partisipasi politik terdiri dari lima dimensi yaitu voting, campaign activity, communal activity, contacting personal on personal matters, dan protest. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari subyek penelitian sebanyak 258 orang. Metode analisis faktor yang digunakan adalah confirmatory factor analysis (CFA) dengan program lisrel 8.70. Pengujian validitas skala partisipasi politik pada penelitian ini dilakukan dengan model second order. Berdasarkan pengujian melalui model second order didapatkan 13 item valid yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi politik.

Kata Kunci: *Validitas konstruk, partisipasi politik, CFA*

Diterima: 14 November 2015

Direvisi: 20 Desember 2015

Disetujui: 28 desember 2015

PENDAHULUAN

Partisipasi politik tidak hanya ditunjukkan dengan keterlibatannya pada partai, tetapi juga berbagai macam aksi protes. Fenomena aksi menggambarkan partisipasi dalam demokrasi. Salah satu peran sentral warga negara dalam demokrasi dan sistem politik lainnya adalah untuk membuat keputusan tentang masalah politik. Dalam demokrasi, ini melibatkan keputusan tentang partai atau calon untuk mendukung dalam pemilihan, serta keputusan tentang siapa yang memegang posisi-posisi isu, bagaimana berpartisipasi dalam politik, dan sebagainya. Dalam sistem demokratis pilihan elektoral berada di pusat proses politik. Dengan demikian, studi pilihan pemilu telah cukup alami menjadi tema inti dalam penelitian perilaku politik, dan penelitian masa lalu telah menghasilkan kemajuan dramatis dalam pengetahuan kita tentang bagaimana pemilih mencapai keputusan mereka (Dalton & Klingemann, 2009).

Modernisasi politik melibatkan peningkatan partisipasi dalam politik oleh kelompok-kelompok sosial di seluruh masyarakat. Artinya, tingkat partisipasi politik pada akhirnya akan mempengaruhi secara positif dalam kemajuan (modernisasi) politik. Partisipasi diperluas dalam politik dapat meningkatkan kontrol masyarakat oleh pemerintah, seperti di negara-negara totaliter, atau mungkin meningkatkan kontrol pemerintah oleh rakyat, seperti di beberapa negara demokratis (Huntington, 1968).

Pemberian suara dalam Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik antara tahun 1950-an sampai 1960 secara umum didefinisikan sebagai terma politik, yang berarti pemungutan suara, keanggotaan partai, kegiatan dalam perhimpunan suka rela (*voluntary association*), kegiatan-kegiatan proses dan sebagainya (Bryant & White, dalam Sudaryanti, 2008).

Budiardjo (1998) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau

tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Alat ukur baku tentang partisipasi politik belum banyak ditemukan baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Padahal pengukuran tentang partisipasi politik banyak dilakukan apalagi menjelang pemilu yang sering dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk mengembangkan sebuah alat ukur berkaitan dengan partisipasi politik. Pengembangan alat ukur partisipasi politik ini diharapkan dapat membantu para peneliti yang berminat meneliti tingkat partisipasi politik warga, atau penelitian-penelitian lain terkait dengan bidang politik. Sehingga dengan adanya alat ukur ini, penelitian terkait partisipasi politik menjadi lebih dapat dipertanggung-jawabkan validitas dan reliabilitasnya. Mengingat peran pengukuran amatlah penting pada penelitian-penelitian ilmu sosial seperti psikologi, pendidikan, politik dan lain-lain, serta kesalahan pengukuran merupakan hal yang paling mendominasi pada penelitian-penelitian ilmu sosial. Jika tidak digunakan alat ukur yang memadai maka akan terjadi kesalahan baik dari segi uji hipotesis maupun pada koefisien regresi (Umar, 2012).

Dalam penelitian ini, peneliti membuat sebanyak 32 pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut penulis buat sendiri berdasarkan pada dimensi-dimensi partisipasi politik yang dikembangkan oleh Dalton (2009). Dimensi-dimensi tersebut terdiri dari pemberian suara dalam pemilu (*voting*), keikutsertaan dalam kampanye politik (*campaign activity*), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan (*communal activity*), mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah (*contacting personal on personal matters*), dan kritik terhadap kebijakan pemerintah (*protest*).

Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (dalam Budiardjo, 1998) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Terminologi partisipasi politik memiliki makna sebagai upaya warga negara dalam mempengaruhi dan memilih struktur otoritas dan kebijakan pemerintah. Definisi ini menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan langsung oleh warga Negara (Conway, dalam Widjanarko (2004).

William Lidle dan Saiful Mujani (2004) menemukan suatu kesimpulan dalam memahami perilaku pemilih pada pemilu. Data survei menunjukkan lima implikasi langsung. Pertama bahwa pemilih Indonesia telah menjadi semakin "rasional." Dari survei sebelumnya, kita tahu bahwa mereka telah mengidentifikasi satu set tujuan prioritas: pertumbuhan ekonomi, secara umum kemakmuran, persatuan nasional, pendidikan, dan penegakan hukum. Mereka beralih ke individu pemimpin bukan untuk partai-partai politik untuk mencapai tujuan ini, dan mereka menetapkan standar bagi mereka integritas pemimpin-pribadi, empati sosial, kompetensi profesional. Temuan positif kedua adalah bahwa kebanyakan pemilih Indonesia tidak memberikan prioritas tinggi pada tuntutan kelompok agama dan etnis, dan karenanya tidak tertarik pada pihak berdasarkan agama atau etnis identitas. Ketiga, implikasi dari kelas sosial yang relevan dengan pilihan partisan kurang jelas. Keempat, dampak independen dari kampanye televisi, terutama pada pemilihan presiden, juga memiliki implikasi diramu untuk kualitas demokrasi. Terakhir, melemahnya identifikasi pemilih dengan partai politik ini bisa dibilang yang paling penting dari temuan dan merupakan implikasi negatif.

Afan Gaffar (dalam Sudaryanti, 2008) menyatakan bahwa selama ini penjelasan-penjelasan teoritis tentang *voting behavior* didasarkan pada tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis, dan politis rasional. Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih. Pendekatan psikologis menggunakan dan mengembangkan konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan perilaku pemilih. Pada pendekatan politis rasional, isu-isu politik menjadi pertimbangan penting. Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilainnya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah partisipasi politik bukan semata sikap-sikap, namun merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat empiris, merupakan kegiatan warga negara asli (preman), bukan individu-individu yang bermain di wilayah pemerintahan; pokok perhatiannya adalah kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dan kegiatan tersebut tidak memperdulikan berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai, yaitu mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah (Nuggraha, 2006).

Dari definisi-definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan suka rela individu ataupun kelompok, baik langsung maupun tidak langsung, untuk aktif dalam kehidupan politik yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal pemilihan pemimpin, pembentukan kebijakan umum, dan semua bentuk aktivitas yang dimaksud mempengaruhi pemerintahan. Kegiatan tersebut adalah pemberian suara dalam pemilu, keikutsertaan dalam kampanye politik, menjadi anggota suatu partai

atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah, dan kritik terhadap kebijakannya.

Bentuk Partisipasi Politik

Conway dalam Widjanarko (2004) mengklasifikasikan bentuk partisipasi politik dalam dua jenis, yakni konvensional dan non-konvensional. Partisipasi yang bersifat konvensional mengarah pada aktivitas yang diterima sebagai sesuatu yang sesuai dengan budaya politik yang dominan. Sebaliknya, partisipasi politik non-konvensional mengarah pada aktivitas yang tidak diterima dalam budaya politik dominan.

Berbeda dengan Conway, Huntington dan Nelson dalam Priambodo (2000) membedakan bentuk-bentuk partisipasi politik dalam kategori sebagai berikut:

1. *Electoral Activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau pun tidak langsung berkaitan dengan pemilu. *Electoral Activity* ini juga mencakup pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan umum.
2. *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau pun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat atau pun tokoh politik tersebut terkait masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka.
3. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik.
4. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan cara langsung misalnya melakukan komunikasi untuk membangun jaringan kerjasama.
5. *Violence*, yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah. Penggunaan kekerasan mencerminkan motivasi-motivasi partisipasi yang cukup kuat. Kekerasan dapat ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan-

kebijakan pemerintah (huru-hara, pemberontakan) atau mengubah seluruh sistem politik dengan cara revolusi.

Sementara itu, Verba *et al* (dalam Priambodo, 2000) menemukan bahwa individu-individu cenderung memilih bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan secara tetap sesuai motivasi dan tujuan, tidak berubah-ubah seperti diasumsikan banyak *analist*. Bentuk-bentuk partisipasi yang sejenis membentuk kelompok (*cluster*) bersama. Pengelompokan tersebut kemudian dimodifikasi oleh Dalton (2009) sebagai berikut:

1. *Voting*, yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan (*voting/electing*). *Voting* adalah bentuk yang paling sederhana untuk mengukur partisipasi.
2. *Campaign activity*, yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan (*extension of electoral participation*). Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai atau seorang kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye, melakukan persuasi terhadap orang lain untuk memilih, dan segala bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan.
3. *Communal activity*. Bentuk-bentuk partisipasi ini berbeda dengan aktivitas kampanye karena aktivitas komunal mengambil tempat di luar *setting* pemilihan (*out side the electoral setting*). Termasuk keterlibatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang *interest* dan *concern* dengan kebijakan umum seperti kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, atau proteksi terhadap konsumen.
4. *Contacting personal on personal matters*. Bentuk partisipasi ini berupa individu melakukan kontak terhadap seseorang berkaitan dengan suatu materi tertentu yang melekat pada orang tersebut. diperlukan inisiatif dan informasi yang tinggi berkaitan isu yang spesifik, dalam kontak yang bersifat perseorangan ini. Bentuk partisipasi ini seringkali digunakan untuk membangun pengertian, kepercayaan, mencari koneksi, atau pun membangun jaringan.

5. *Protest*, yaitu bentuk-bentuk partisipasi yang *unconventional* seperti demonstrasi dan gerakan protes. Walaupun individu-individu yang memilih bentuk partisipasi ini sering berada di luar jalur/saluran yang normal, namun mereka seringkali menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi.

Tingkat Partisipasi Politik

Negara-negara demokratis pada umumnya menganggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik, serta ingin melibatkan diri dalam kegiatankegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 1998).

Tingkat partisipasi politik mengacu pada frekuensi dilakukannya bentuk-bentuk partisipasi politik di suatu komunitas. Dalam bentuk yang paling sederhana, tingkat partisipasi diukur dari presentasi orang yang memberikan suara dalam sebuah proses pemilihan (Priambodo, 2000). Sementara itu, McClosky (dalam Budiardjo, 1998) berpendapat bahwa ada yang tidak ikut dalam pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai, masalah politik. Ia pun mengemukakan bahwa sikap acuh tak acuh malahan dapat dianggap sebagai hal yang positif karena memberikan fleksibilitas kepada sistem politik.

Berdasarkan penjelasan mengenai tingkat partisipasi politik, maka peneliti menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik ditunjukkan dengan pemberian suara dalam sebuah proses pemilihan, aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan (*extension of electoral participation*), aktivitas komunal di luar *setting* pemilihan, kontak terhadap seseorang berkait dengan suatu materi tertentu yang melekat pada orang tersebut, dan demonstrasi atau pun gerakan protes.

METODE

Subjek

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 258 orang yang telah memiliki hak untuk memilih. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non-probability sampling* atau peluang terpilihnya sampel tidak diketahui atau dihitung.

Gambaran Umum Skala

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan model skala Likert, dimana variabel penelitian dijadikan sebagai titik tolak penyusunan item-item instrumen. Jawaban dari setiap instrumen ini memiliki gradasi dari tertinggi (sangat positif) sampai terendah (sangat negatif), dengan 4 kategori jawaban, yaitu “Sangat Setuju” (SS), “Setuju” (S), “Tidak Setuju” (TS), “Sangat Tidak Setuju” (STS). Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pemusatan (*central tendency*) atau menghindari jumlah respon yang bersifat netral. Model ini terdiri dari pernyataan positif (*favourable*) dan pernyataan negatif (*unfavourable*). Penskoran tertinggi diberikan pilihan sangat setuju dan terendah pada pernyataan sangat tidak setuju untuk pernyataan *favourable*.

Selanjutnya pernyataan tertinggi untuk pernyataan *unfavourable* diberikan pada pilihan jawaban sangat tidak setuju dan skor terendah diberikan untuk pilihan sangat setuju. Skor-skor tersebut dihitung dengan dua cara yaitu melalui item *favourable* dan *unfavourable*, untuk item *favourable* penskorannya yaitu SS = 4, S = 3, TS = 2, STS = 1, dan sebaliknya untuk *unfavourable*.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga alat ukur.

Adapun tiga alat ukur tersebut yaitu:

Skala partisipasi politik penulis susun berdasarkan dimensi-dimensi partisipasi politik dari Dalton (2009) yang terdiri dari pemberian suara dalam pemilu (*voting*), keikutsertaan dalam kampanye politik (*campaign activity*),

menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan (*communal activity*), mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah (*contacting personal on personal matters*), dan kritik terhadap kebijakan pemerintah (*protest*). Berikut *blue-print* skala tersebut:

Tabel 1.
Blue Print Skala Partisipasi Politik

No.	Dimensi	Indikator	Nomor Item	Jumlah
1	<i>Voting</i>	Pemberian suara dalam pemilu	1, 2, 6, 7	4
2	<i>Campaign activity</i>	Bekerja untuk partai/kandidat	3, 4, 5, 8, 9	5
		Menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye politik	10, 11, 16, 17	4
		Melakukan persuasi kepada orang lain untuk memilih	12, 13, 18, 19	4
3	<i>Communal activity</i>	Keterlibatan dengan kelompok masyarakat atau kelompok kepentingan	14, 15, 20, 21	4
4	<i>Contacting personal on personal matters</i>	Mengadakan hubungan dengan anggota lembaga politik	22, 23, 30	3
5	<i>Protest</i>	Lisan	24, 25, 31, 32	4
		Tulisan	26, 27, 28, 29	4
Total				32

Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis factor konfirmatorik (CFA). Uji Validitas konstruk ini yang kemudian akan menentukan apakah setiap item dalam skala mengukur partisipasi politik.

Adapun logika dari CFA (Umar, 2012):

1. Bahwa ada sebuah konsep atau *trait* berupa kemampuan yang didefinisikan secara operasional sehingga dapat disusun pertanyaan atau pernyataan untuk mengukurnya. Kemampuan ini disebut faktor, sedangkan pengukuran terhadap faktor ini dilakukan melalui analisis terhadap respon atas item-itemnya.
2. Diteorikan setiap item hanya mengukur satu faktor saja, begitupun juga tiap subtes hanya mengukur satu faktor juga. Artinya baik item maupun subtes bersifat unidimensional.
3. Dengan data yang tersedia dapat digunakan untuk mengestimasi matriks korelasi antar item yang seharusnya diperoleh jika memang unidimensional. Matriks korelasi ini disebut sigma (Σ), kemudian dibandingkan dengan matriks dari data empiris, yang disebut matriks S. Jika teori tersebut benar (unidimensional) maka tentunya tidak ada perbedaan antara matriks Σ - matriks S atau bisa juga dinyatakan dengan $\Sigma - S = 0$.
4. Pernyataan tersebut dijadikan hipotesis nihil yang kemudian diuji dengan *chi square*. Jika hasil *chi square* tidak signifikan $p > 0,05$, maka hipotesis nihil tersebut “tidak ditolak”. Artinya teori unidimensionalitas tersebut dapat diterima bahwa item ataupun sub tes instrument hanya mengukur satu faktor saja.
5. Jika model *fit*, maka langkah selanjutnya menguji apakah item signifikan atau tidak mengukur apa yang hendak di ukur, dengan menggunakan *t-test*. Jika hasil *t-test* tidak signifikan maka item tersebut tidak signifikan dalam

mengukur apa yang hendak diukur, bila perlu item yang demikian di drop dan sebaliknya.

6. Terakhir, apabila dari hasil CFA terdapat item yang koefisien muatan faktornya negative, maka item tersebut harus di drop. Sebab hal ini tidak sesuai dengan sifat item, yang bersifat positif (*favorable*).

Adapun pengujian analisis CFA seperti ini dilakukan dengan bantuan software LISREL 8.70 (Joreskog dan Sorbom, 2006).

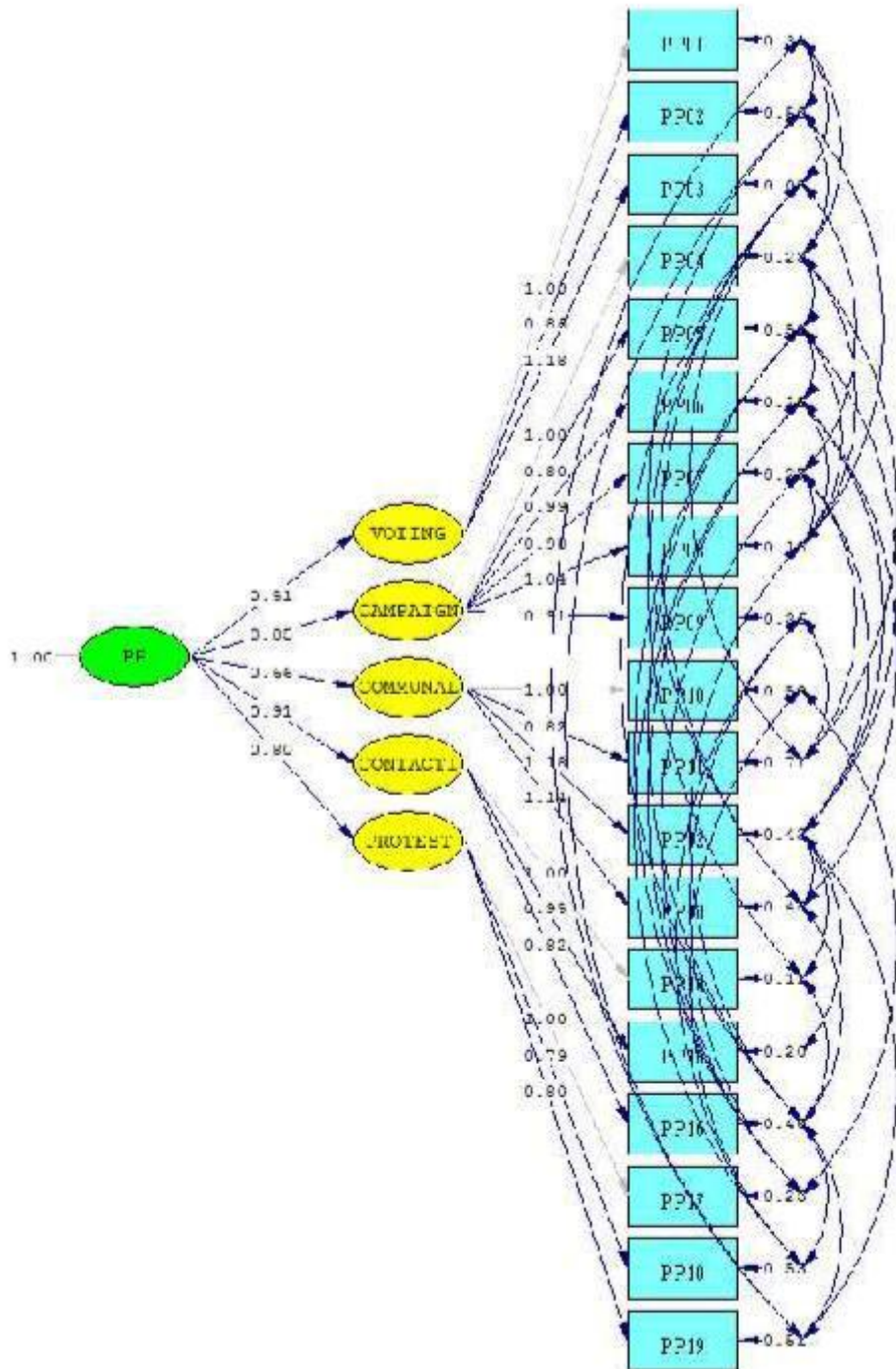
HASIL

Model pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan model *second order*. Pada pengujian dengan model *second order* diteorikan bahwa partisipasi politik memiliki lima dimensi yakni pemberian suara dalam pemilu (*voting*), keikutsertaan dalam kampanye politik (*campaign activity*), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan (*communal activity*), mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah (*contacting personal on personal matters*), dan kritik terhadap kebijakan pemerintah (*protest*) dan lebih lanjut kelima dimensi ini mengukur satu hal yaitu partisipasi politik. Berikut ini penjelasan hasil pengujian CFA partisipasi politik melalui model *second order*.

Peneliti menguji apakah 32 item yang ada bersifat unidimensional, artinya benar hanya mengukur partisipasi politik. Dari hasil analisis CFA yang dilakukan dengan model *second order*, ternyata tidak fit, dengan Chi-Square = 3468,96 , df = 464 , P-value = 0,00000 , RMSEA = 0,159. Oleh sebab itu, peneliti melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, namun ternyata tidak dapat diproses. Peneliti pun kemudian menggugurkan item-item yang saling berkorelasi sehingga terdapat 19 item yang kembali dianalisis dengan CFA. Ternyata tidak fit, dengan Chi-Square = 557,60 , df = 147, P-value = 0,00000 , RMSEA = 0,104. Oleh sebab itu, peneliti kembali melakukan

modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh model fit seperti pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1
Analisis faktor konfirmatorik dari skala partisipasi politik



Dari gambar 1 diketahui nilai Chi-Square menghasilkan P-value $> 0,05$ (tidak signifikan), yang artinya model dengan satu faktor dapat diterima, bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu partisipasi politik.

Selanjutnya, peneliti melihat apakah signifikan item tersebut mengukur faktor yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu digugurkan atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil tentang koefisien muatan faktor dari item. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor seperti pada tabel 2.

Tabel 2.
Muatan faktor Item Skala Partisipasi Politik

No	Koefisien	Standar error	Nilai t	Sig	Korelasi	Kesimpulan
1	1,00	-	-	V	4	Diterima
2	0,86	0,07	11,65	V	5	Diterima
3	1,18	0,11	10,44	V	6	Gugur
4	1,00	-	-	V	5	Diterima
5	0,80	0,05	14,57	V	6	Gugur
6	0,99	0,05	19,27	V	6	Gugur
7	0,98	0,05	18,86	V	5	Diterima
8	1,04	0,05	19,16	V	6	Gugur
9	0,91	0,05	16,86	V	3	Diterima
10	1,00	-	-	V	2	Diterima
11	0,82	0,10	8,09	V	4	Diterima
12	1,18	0,11	10,87	V	7	Gugur
13	1,14	0,11	10,65	V	5	Diterima
14	1,00	-	-	V	3	Diterima
15	0,95	0,04	24,69	V	1	Diterima

VALIDITAS SKALA PARTISIPASI POLITIK

16	0,82	0,04	19,08	V	7	Gugur
17	1,00	-	-	V	5	Diterima
18	0,79	0,06	12,23	V	4	Diterima
19	0,80	0,06	12,61	V	4	Diterima

Keterangan : tanda V = signifikan ($t > 1,96$) ; X = tidak signifikan

Dari tabel di atas, seluruh nilai t bagi koefisien muatan faktor item adalah signifikan. Selanjutnya melihat muatan faktor dari item, apakah ada yang bermuatan negatif, maka diketahui tidak terdapat item yang muatan faktor-nya negatif. Nilai pada kolom korelasi diperoleh dari jumlah item yang saling terkait (berkorelasi) dengan item lain, yang berarti merupakan kesalahan pengukuran item. Peneliti menetapkan secara subjektif maksimal item saling berkorelasi adalah lima kali korelasi. Dengan demikian, jika item berkorelasi lebih dari 5 kali dengan item lain, maka item tersebut digugurkan. Item-item yang saling berkorelasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Matriks korelasi kesalahan pengukuran antar item dari skala partisipasi politik

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Total
1	1	v	v	v															v	4
2	v	1		v				v					v						v	5
3	v		1				v			v		v	v		v					6
4	v	v		1	v			v		v										5
5				v	1	v		v			v				v	v				6
6					v	1		v			v	v					v	v		6
7			v				1	v		v	v						v			5
8		v		v	v	v	v	1								v				6
9									1	v					v	v				3
10										1							v	v		2
11			v	v			v	v			1									4
12					v	v	v					1	v	v	v				v	7
13		v	v			v						v	1			v				5
14		v										v		1		v				3

15						v		1				1
16	v	v		v			v	v	1	v	v	7
17			v	v	v					1		5
18				v		v	V		v	1		4
19	v	v						v	v		1	4

Tanda V menunjukkan korelasi kesalahan pengukuran item

Dari tabel 3 di atas, menunjukkan korelasi kesalahan pengukuran antar item dari skala partisipasi politik. Diketahui hampir keseluruhan item saling berkorelasi. Pada model pengukuran ini terdapat beberapa kesalahan pengukuran item yang saling berkorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut bersifat multidimensional pada dirinya masing-masing, dan tidak hanya mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan demikian secara keseluruhan item yang digugurkan adalah item nomor 3, 5, 6, 8, 12, dan 16 sebab berkorelasi dengan lebih dari 5 item lain, yang artinya item tersebut disarankan untuk tidak digunakan.

DISKUSI

Hasil pengujian dengan model *second order* dapat disimpulkan bahwa semua dimensi pada skala partisipasi politik *fit* mengukur tentang partisipasi politik. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa dengan menggunakan 32 item pada awalnya tidak *fit*, peneliti melakukan modifikasi dimana kesalahan pengukuran antar item dikorelasikan sehingga diperoleh 19 item untuk diuji kembali.

Peneliti kemudian menguji 19 item dengan model yang sama yaitu *second order*, namun belum diperoleh model *fit*. Peneliti melakukan modifikasi dimana kesalahan pengukuran antar item dikorelasikan sehingga memperoleh model yang *fit*. Dari 19 item yang diuji, peneliti menetapkan secara subjektif batas maksimal korelasi antar item sebanyak lima kali sehingga diperoleh 13 item yang baik untuk digunakan mengukur skala partisipasi politik. Dengan demikian, ke-13 item tersebut dapat disarankan untuk bisa digunakan dalam

mengukur partisipasi politik. Adapun 6 item lainnya memiliki kesalahan pengukuran antar item lebih dari lima kali. Ke-enam item tersebut adalah item nomor 3, 5, 6, 8, 12, dan 16.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menguji skala partisipasi politik dengan model per-dimensi, dimana setiap dimensi dengan itemnya diuji sehingga terdapat 5 kali pengujian pada skala partisipasi politik yang terdiri dari lima dimensi. Demikian juga, peneliti tidak melakukan pengujian dengan 1 faktor atau 5 faktor. Pengujian 1 faktor dilakukan dimana dilakukan pengujian dengan menganggap seluruh dimensi tidak ada. Diasumsikan bahwa semua item mengukur satu faktor yaitu partisipasi politik. Sedangkan pengujian dengan lima faktor, dimana setiap item mengukur dimensi masing-masing dari lima dimensi yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyarankan untuk melakukan pengujian dengan model-model tersebut sehingga akan dihasilkan model pengujian yang cocok.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (1998) *Patisipasi dan partai politik: Sebuah bunga rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dalton, Russel J, dan Klingemann, Hans-Dieter (2009). *Political behavior*. New York: Oxford University Press.
- Huntington, Samuel P. (1968). *Political order in changing societies*. London: Yale University Press.
- Mujani, Saiful dan Liddle, R. William (2010). Personalities, parties, and voters. *Journal of democracy volume 21, number 2*. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
- Nugraha, Benny (2006). Perilaku memilih kepala daerah bagi masyarakat di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas menjelang pemilihan Kepala Daerah secara langsung. *Jurnal ilmu sosial*.
- Priambodo, Arif (2000). Sikap politik, pengaruh kelompok, dan partisipasi politik, di kalangan mahasiswa. *Skripsi: Fakultas Psikologi UI*.

- Sudaryanti (2008). Analisis tentang perilaku pemilih pada pilkada tahun 2005 di Surakarta. *Jurnal ilmu sosial*. Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Umar, J. (2012). *Analisis faktor konfirmatorik*. Bahan Perkuliahan. Fakultas Psikologi. UIN Jakarta. Tidak dipublikasikan.
- Widjanarko, Wisnu (2004). Hubungan antara modal sosial dan identitas kemahasiswaan dengan partisipasi politik konvensional. *Tesis*: Fakultas Psikologi UI.

